

PERAN DINAS PERIKANAN KOTA BATAM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NELAYAN TAHUN 2020

Kustiawan¹, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Nuri Widyastuti³
Nuritutii1@gmail.com

Program studi ilmu pemerintahan, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

The city of Batam has the potential of capture fisheries to improve the fishermen's economy, the potential of capture fisheries has not been utilized properly by fishing groups, for that the importance of the role of the fisheries service in helping groups of fishermen who are powerless become empowered to improve the economy of fishing groups. Batam City Fisheries Service has a role according to Indraha theory (Labolo 2010:36). This type of research is qualitative with descriptive research techniques. The results of this study indicate that the role of the fisheries service as a regulator is a direct policy from the Batam city government to mobilize fishermen by helping to provide equipment and supplies for fishing activities through a program to improve capture fisheries facilities and infrastructure. The role of the fisheries service as a facilitator, the government must be an agent that is able to create and provide facilitation in accordance with the needs of the community in accordance with safe, comfortable conditions. The role of counseling is oriented towards increasing knowledge, skills and attitudes. Extension activities are one of the efforts made to increase the knowledge of fishermen groups. fishermen groups have a strategic position in realizing the independence of members in the sustainability of capture fisheries activities. And the role as a facilitator can be realized in the form of facilitating through partnerships with Microfinance Fishermen Institutions (LKM) for fishermen with economic welfare problems by facilitating access to capital. One of them is developing partnership capital for fishermen with financial institutions. The government's role as a dynamist serves to provide effective guidance and direction. The Batam City Fisheries Service has a major role in providing guidance, direction and input. In this case, it is realized with assistance. Seeing the need for a large group of fishermen for guidance and input from the fisheries service through government agencies and mentoring in charge of providing guidance. As a dynamist, it can be realized through mentoring, socialization and field visits.

Key Words: Role, Empowerment, boost the economy.

I. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga nya sendiri sesuai denga peraturan perundang-undangan termasuk dalam salah satu fungsi pemerintahan yakni pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat

nelayan sangat penting diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat nelayan bisa sejahtera, mandiri, memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan ikut aktif berpartisipasi dalam membantu dan melaksanakan program-program kebijakan agar nelayan lebih berdaya. Peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di kota Batam sangat penting, mengingat Kondisi masyarakat nelayan di Kota Batam masih banyak yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup sehingga nelayan tidak berdaya dan tingkat ketergantungan masih tinggi. Dengan adanya peran Dinas Perikanan Kota Batam diharapkan bisa membantu masyarakat nelayan dalam meningkatkan perekonomian.

Kota Batam memiliki potensi-potensi Perikanan tangkap serta menyimpan kekayaan sumber daya alam yang besar. Dengan potensi yang dimiliki seharusnya mencukupi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian kesejahteraan masyarakat nelayan tangkap. Namun selama ini potensi potensi Perikanan tangkap belum dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan tangkap. Kelompok nelayan dikota Batam terdiri dari nelayan tangkap dan pembudidaya. Pada dasarnya nelayan di kota Batam terbentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Tujuan kelompok nelayan yaitu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam hal ini kehidupan kelompok nelayan bergantung pada hasil tangkapannya itu tidak sebanding dengan pengeluarannya sehari-hari, namun dengan adanya kelompok nelayan ini terjalin bisa saling membantu anggota nya yang membutuhkan bantuan.

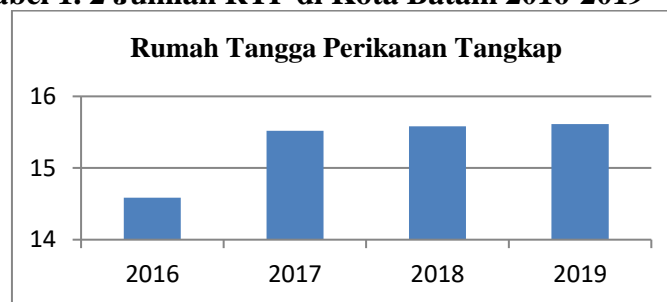
Tabel 1. 1 Jenis Kelompok Nelayan di Kota Batam 2017-2019

No.	Jenis Kelompok	2017	2018	2019
1.	KUB	491	580	633
2.	POKDAGAN	223	240	247
3.	POKHLASAR	52	60	72

Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam

Rumah tangga Perikanan tangkap merupakan rumah tangga yang melakukan aktivitasnya dilaut, dengan adanya peningkatan kelompok nelayan akan berdampak dengan peningkatan rumah tangga Perikanan tangkap. Meningkatnya rumah tangga Perikanan tangkap tentu berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup rumah tangga Perikanan tangkap.

Tabel 1. 2 Jumlah RTP di Kota Batam 2016-2019



Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam

Peningkatan produktifitas masyarakat nelayan membutuhkan peran dan keterlibatan langsung dari dinas Perikanan yang membidangi kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat nelayan dengan alat tangkap yang modern dengan memberdayakan seluruh masyarakat nelayan secara optimal.

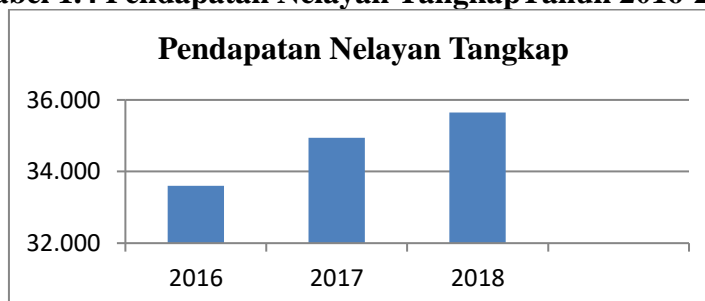
Tabel 1.3 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2019



Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam

ketidakberdayaan dapat dilihat nelayan dari kesenjangan ekonomi seperti pendapatan masyarakat nelayan yang Masyarakat nelayan bergantung pada sumber daya Perikanan yang tidak pasti setiap harinya. Ketidakpastian tersebut dikarenakan nelayan harus mencari dan menangkap ikan untuk memperoleh pendapatan, berbeda dengan masyarakat yang bekerja di PT, mereka sudah mendapatkan hasil per bulan. peningkatan pendapatan nelayan tidak sama dengan pendapatan masyarakat yang bekerja di daratan. Peningkatan produksi Perikanan tangkap berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan kelompok nelayan. Dinas Perikanan memiliki peran yang besar dalam membantu meningkatkan perekonomian kelompok nelayan dalam pendapatan, peningkatan produksi, peningkatan sarana dan prasarana kelompok nelayan. kondisi seperti ini tidak lepas dari perhatian yang telah dilakukan dinas Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan baik berupa pemberian bantuan peralatan tangkap, dan akses modal usaha.

Tabel 1.4 Pendapatan Nelayan Tangkap Tahun 2016-2018



Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam

Berdasarkan observasi alat-alat penangkapan nelayan yang dimiliki umumnya masih tradisional, masih menggunakan sampan, jala, pancing, dan umpang untuk melaut. Dengan keterbatasan alat yang dimiliki akan berpengaruh dengan hasil penangkapan, hasil produksi dan pendapatan kelompok nelayan. Terbatasnya alat tangkap yang dimiliki kelompok nelayan tangkap. membuat hasil penangkapan dilaut tidak efektif dan efisien sehingga peningkatan hasil produksi tidak mencukupi kebutuhan nelayan. dengan ini dinas Perikanan memiliki peran dalam membantu dan memfasilitasi Alat-alat yang didapat berupa sarana dan prasarana tangkap modern.

Tabel 1.5 Sarana Nelayan Tangkap Tahun 2016-2019

Armada	2016	2017	2018	2019
Perahu Tanpa Motor	1.714	1.734	1.734	36.154

perahu motor tempel/ketinting	4.969	4.717	5.142	4.101
Boat < 5 GT	1.846	1.926	1.957	2.041
Boat 5-10 GT	86	97	97	957
Boat 10-30 GT	37	50	50	36
Boat >30 GT	62	59	59	63

Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam

Berdasarkan peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 3 /PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c partisipasi masyarakat masyarakat dapat dilakukan terhadap pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam berupa :

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Penyuluhan dan pendampingan
- c. Kemitraan usaha
- d. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan
- e. Penguatan kelembagaan

Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pelatihan bagi masyarakat agar mengerti dan paham dalam menggunakan alat-alat tangkapan modern. Sehingga ketika kelompok nelayan melakukan aktivitas tidak terbebani dengan penggunaan alat-alat tangkap modern. Sejauh ini kelompok nelayan belum memiliki alat-alat tangkap modern sehingga kelompok nelayan harus diberdayakan melalui pelatihan dan fasilitasi tangkapan modern untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini regulasi yang mengatur tentang nelayan di kota Batam untuk kebijakan khusus mengatur nelayan belum ada, namun ada kebijakan langsung dari pemerintahan kota Batam yaitu pemberdayaan untuk menggerakkan ekonomi nelayan tradisional atau nelayan kecil. Hal ini dilakukan dengan membantu penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan melaut seperti pompa dan alat tangkap melalui program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan tangkap.

Penelitian ini difokuskan pada Peran yang dilakukan dinas Perikanan kota Batam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan tangkap. Berdasarkan observasi peran dinas Perikanan kota Batam telah memberikan upaya perhatian dan mengupayakan terlaksananya pemberdayaan nelayan, namun masih terdapat nelayan yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan kurangnya optimal peran yang dilakukan oleh dinas Perikanan dalam penyuluhan dan pendampingan, disisi lain perlu pengawasan dalam bantuan yang terdistribusi, dinas Perikanan perlu memberikan dukungan kelembagaan bagi nelayan , dan terus melakukan sosialisasi terhadap kemitraan yang bertujuan untuk mempermudah nelayan dalam mengakses modal usaha diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kelompok nelayan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

PERAN

Peran pemerintah menurut Ndraha (Labolo, 2010:36) :

1. Pemerintah sebagai regulator dengan menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penertiban peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Peran sebagai regulator dikembangkan merujuk pada aspek aturan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan kelompok nelayan. Dalam hal ini bentuk peran pemerintah sebagai regulator yaitu :

- a. regulasi yang mengatur tentang nelayan di kota Batam untuk kebijakan khusus mengatur nelayan belum ada, namun ada kebijakan langsung dari pemerintahan kota Batam yaitu pemberdayaan untuk menggerakkan ekonomi nelayan tradisional atau nelayan kecil. Hal ini dilakukan dengan membantu penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan melaut seperti pompong dan alat tangkap melalui program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan tangkap.
2. Pemerintah sebagai dinamisor merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan. Peran pemerintah sebagai dinamisor berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif. Dinas Perikanan Kota Batam memiliki peran yang besar dalam memberikan bimbingan, arahan dan masukan. Hal ini diwujudkan melalui pendampingan yang bertugas dalam memberikan arahan bimbingan, dan masukan kepada kelompok nelayan. Dalam hal ini pemerintah sebagai dinamisor yaitu :
 - a. Pendampingan dalam Dinas Perikanan Kota Batam dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraannya.
2. Pemerintah sebagai fasilitator dengan merupakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi yang aman, nyaman. Serta menyediakan sarana dan prasarana, pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal melalui pelatihan, pendidikan, keterampilan, dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan kelompok nelayan. hal ini diwujudkan melalui pelatihan, penguatan kelembagaan, kemitraan. Dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator diwujudkan melalui :
 - a. Pelatihan merupakan cara yang dilakukan Dinas Perikanan Kota Batam untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat nelayan serta meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Kota Batam.
 - b. Dalam terbentuknya kelompok Dinas Perikanan Kota Batam memfasilitasi bantuan kepada kelompok dan membentuk kelompok guna meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dan mengajak dengan tujuan berkelompok agar dapat membangun kebersamaan, memupuk modal, serta mempermudah penyampaian informasi.
 - c. Peranan ini dapat diwujudkan dalam bentuk memfasilitasi melalui lembaga mikro keuangan nelayan untuk membantu nelayan yang mengalami lemahnya ekonomi bagi nelayan masalah kesejahteraan ekonomi.

MASYARAKAT NELAYAN

Berdasarkan Undang – Undang nomor 7 tahun 2016 pasal 6 ayat 1 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam klasifikasi nelayan meliputi:

1. Nelayan kecil

Merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (gt).
2. Nelayan tradisional

Merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
3. Nelayan buruh

Merupakan nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

4. Nelayan pemilik

Merupakan nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan. Dalam pasal 3 terdapat ruang lingkup pengaturan pemberdayaan nelayan kecil meliputi:

- a. Pembiayaan dan permodalan
- b. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dibidang Perikanan
- c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil
- d. Pelaksanaan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan pembudidayaan ikan
- e. Kemitraan

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian adalah deskriptif yang berupaya menggambarkan secara umum tentang fakta yang berhubungan dengan peranan dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Kota Batam. Hal tersebut dilakukan dengan memahami serta menganalisa apa yang didengar, mempelajari proses penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, serta menfasirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut berdasarkan konteks ruang dan waktu serta situasi secara alami.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yang diambil dari sumber pertama dilapangan, diperoleh melalui hasil wawancara dengan para informan yang bersangkutan ditempat penelitian dengan para pihak yang mengetahui tentang peran dinas Perikanan kota Batam dalam meningkatkan perekonomian nelayan tahun 2020.
2. Data sekunder peneliti mengambil data dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, dokumen-dokumen dari instansi dinas Perikanan kota Batam

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perikanan kota Batam sebagai organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Batam, dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh organisasiperangkat daerahnya. Dinas Perikanan kota Batam harus mampu memecahkan permasalahan dan tantangan di kota Batam dalam melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui pembangunan dalm sektor Perikanan. Sejalan dengan ini peran dinas Perikanan kota Batam berperan terhadap peningkatan perekonomian kelompok nelayan. dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada teori dan fokus penelitian yang dilakukan penelitian sekarang, dan ditemukan peningkatan yang dilakukan melalui peran dinas Perikana kota Batam.

1. PERAN DINAS PERIKANAN SEBAGAI REGULATOR

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Saat ini regulasi yang mengatur tentang nelayan di kota Batam untuk kebijakan khusus mengatur nelayan belum ada, namun ada kebijakan langsung dari pemerintahan kota Batam yaitu pemberdayaan untuk menggerakkan ekonomi nelayan tradisional atau nelayan kecil. Hal ini dilakukan dengan membantu penyediaan peralatan dan perlengkapan melalui program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan tangkap. Kebijakan yang langsung dari pemerintahan kota Batam baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya dengan tujuan

peningkatan kesejahteraan nelayan. Kebijakan pemerintahan kota Batam melalui dinas Perikanan kota Batam memberikan bantuan alat-alat penangkapan modern, karena alat yang dimiliki kelompok nelayan masih terbatas jumlah, ukuran dan kelayakan pakai yang berpengaruh pada keselamatan nelayan.

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan kelompok nelayan dalam melakukan aktivitas di laut dan berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Bantuan alat-alat tangkap merupakan bantuan modal berupa alat-alat tangkapan yang bersumber dari anggaran permodalan pemerintah Kota Batam dan pemerintah pusat Provinsi Kepulauan Riau (DAK). Tujuan bantuan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, memfasilitasi kelompok nelayan, serta menjadi awal modal kelompok untuk dikelola kelompok nelayan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah selaku pendamping Perikanan lapangan (PPL):

“tentunya dalam bantuan yang diberikan kelompok akan menambah pendapatan kelompok nelayan, kalau sudah menambah pendapatan diharapkan kelompok tersebut bisa sejahtera dan mandiri dalam artian kelompok tersebut bisa mengelola bantuan tersebut dengan baik dan bantuan tersebut nantinya akan mengalami perguliran dikelompok agar semua anggota nya bisa merasakan bantuan tersebut.” (wawancara 19 februari 2021).

Hasil wawancara diatas menunjukkan peran dinas Perikanan sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran Karena dinas Perikanan sudah berperan penting untuk mendorong memberikan bantuan kepada kelompok nelayan agar kebutuhan kelompok terpenuhi dan bisa meningkatkan hasil produktivitas kelompok nelayan sehingga bisa menambah pendapatan kelompok nelayan dan lebih efisien dan efektif dalam penangkapan. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Mardijono selaku Koordinator penyuluh :

“pelaksanaan bantuan sudah tepat sasaran dikarenakan ada beberapa persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bisa mendapatkan bantuan dan memberikan edukasi sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan mereka, partisipasi kelompok nelayan harus aktif dan masuk kedalam anggota koperasi , memiliki buku tabungan dan mempunyai jaminan.” (wawancara 23 februari 2021).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bantuan yang dilakukan oleh dinas Perikanan kota Batam sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok nelayan dan memberikan edukasi kepada kelompok nelayan yang menerima bantuan agar dapat memanfaatkan sehingga bantuan tersebut dapat bergulir ke anggota yang lainnya. dalam memberikan bantuan membutuhkan mekanisme agar bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Advokat selaku Kepala UPT Pelayanan Perikanan:

“ mekanisme mendapatkan permodalan melalui 5 mekanisme, pertama kelompok yang telah terdaftar di Dinas Perikanan Kota Batam minimal 6 bulan terakhir kelompok yang belum pernah mendapatkan kegiatan bantuan. Kedua, kelompok telah terdaftar berprestasi dalam mengelola kegiatan dikelompoknya (telah melaksanakan dengan tertib administrasi kelompok, tertib kegiatan penabungan, tertib pertemuan bulanan, tertib menjalankan kesepakatan pengelolaan kegiatan yang telah dibuat, tertib menyampaikan laporan kegiatan dan melaksanakan kegiatan sosial. Ketiga, kelompok yang telah menjadi anggota koperasi nelayan binaan Dinas Perikanan Kota Batam. Keempat, berprofesi sebagai pelaku utama Perikanan yang dibuktikan dengan kartu KUSUKA/KTP. Kelima, kelompok dan anggota mempunyai tekad dan kemauan yang kuat dalam berusaha khususnya dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan.”(wawancara 19 februari 2021).

Hasil wawancara diatas menunjukkan Dinas Perikanan sangat mendukung dengan adanya permodalan melalui bantuan alat-alat penangkapan dan memudahkan masyarakat nelayan dalam meningkatkan produktivitas nelayan dengan adanya alat-alat penangkapan yang lebih modern sehingga memenuhi kebutuhan kelompok nelayan. . Pernyataan ini juga disampaikan oleh bapak Muhammad Nor dari kelompok Udang Kara :

PERAN DINAS PERIKANAN SEBAGAI DINAMISATOR

Pemerintah sebagai dinamisator merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif. Dinas Perikanan Kota Batam memiliki peran yang besar dalam memberikan bimbingan, arahan dan masukan. Dalam hal ini diwujudkan dengan pendampingan. Melihat kebutuhan kelompok nelayan yang besar dalam bimbingan dan masukan dari dinas Perikanan melalui lembaga pemerintah maupun pendampingan yang bertugas memberikan arah bimbingan..

Proses pendampingan dilakukan dari adanya sosialisasi dan memberikan pengetahuan mengapa kelompok nelayan harus diberdayakan, membentuk kelompok nelayan, melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada kelompok nelayan dan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap bantuan yang telah terdistribusi kepada kelompok. Untuk itu Dinas Perikanan Kota Batam memberikan pendampingan yang dilakukan kepada kelompok nelayan dengan tujuan sebagaimana dinyatakan oleh wawancara, Hal ini disampaikan oleh ibu Sri Aslinda Ginting selaku Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) :

“pendampingan yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kota Batam menyertakan kelompok nelayan dalam mengembangkan berbagai potensi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah ikan, dan keluarganya, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.”(wawancara 10 februari 2021).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran yang berarti untuk kelompok nelayan, pendampingan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan motivasi kepada kelompok yang sedang ada masalah, kelompok nelayan selalu melakukan pendampingan agar tetap dapat berjalan dengan semestinya, dan selalu mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan kelompok nelayan. namun masih terdapat salah satu kelompok yang tidak pernah melakukan pendampingan dan tidak pernah diketahui aktivitas dan kegiatannya. Perkembangan kelompok nelayan dalam melakukan kegiatan, kunjungan yang dimaksud agar dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada kelompok nelayan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi yang disampaikan oleh pendamping. Pernyataan ini juga disampaikan oleh kelompok nelayan udang kara :

“ saat kami mendapatkan bantuan ada yang mendampingi kami dan memberikan arahan bahwa bantuan tersebut nantinya harus dikelola dengan baik, setelah kami mendapatkan bantuan, kami juga di monitoring oleh pendamping agar bantuan tersebut dipergunakan dengan sebaiknya dan anggota yang lainnya dapat ikut merasakan ”

Berdasarkan wawancara diatas pendampingan yang dilakukan dengan memberikan arahan dengan sebaik-baiknya agar kelompok nelayan dapat memahami dan mengerti informasi yang akan disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

2. PERAN DINAS PERIKANAN SEBAGAI FASILITATOR

Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi yang aman, nyaman. Seperti menyediakan sarana dan prasarana, pemerintah juga bergerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan kelompok nelayan. Peran yang dilakukan dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian nelayan dan mensejahterakan nelayan, penyuluhan dilakukan dengan cara berkelompok dan kelembagaan. Penyuluhan berorientasi kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Keterampilan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak tidak mampu menjadi mampu dalam usahanya. Sikap dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak mau menjadi mau dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan peluang usaha yang diciptakan.

Penyuluhan ini diorientasikan dinas Perikanan dalam meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan. Bentuk pelatihan yang dimaksud adalah dengan mengundang kelompok nelayan yang dibuat oleh dinas Perikanan kota Batam. Penyadaran ini dilakukan dengan penyuluhan pemberian pelatihan kepada kelompok nelayan yang akan merubah keterampilan mereka. Peran dinas dalam hal penyedia pelatihan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok nelayan bertujuan untuk memberikan motivasi, meningkatkan pengetahuan, wawasan, memberikan informasi dan pemahaman tentang penggunaan alat-alat tangkap yang ramah terhadap lingkungan, dan membantu meningkatkan perekonomian kelompok nelayan setelah mengikuti pelatihan. Hal ini disampaikan oleh Mardijono, A.Pi,M.S selaku Pembina forum KUB Kota Batam.

“manfaat pelatihan tentunya menambah pengetahuan dan informasi untuk kelompok nelayan, bagaimana menggunakan alat-alat penangkapan yang modern dan nantinya akan mempengaruhi hasil penangkapan yang efektif dan efisien, serta meningkatnya produksi penangkapan. pelatihan dari Pembina dan penyuluh yang dibuat, berupa pelatihan administrasi kelompok yang terdiri dari kelembagaan dan keuangan. Tujuannya agar mampu mengelola kelompok dengan baik, sehingga usaha keberlanjutan kelompok berjalan Serta pelatihan ini untuk memastikan kegiatan kelompok dapat berjalan dengan baik terutama memberikan pelatihan dari sisi keuangan dan harus transparan, kelompok nelayan harus bisa mengelola keuangan agar tidak terjadi masalah nantinya.” (wawancara 23 februari 2021).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dinas Perikanan telah memberikan perhatian dan pentingnya kualitas SDM nelayan. nelayan telah merasakan manfaatnya dengan meningkatnya produksi dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan kelompok nelayan. Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok nelayan. kelompok nelayan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kemandirian anggota dalam keberlangsungan aktivitas Perikanan tangkap. Salah satu bentuk kelembagaan nelayan yaitu dengan adanya KUB yang bergerak di bidang penangkapan ikan, dengan dibentuknya KUB Perikanan tangkap tentu menjadi satu langkah masyarakat nelayan dalam mengembangkan kesejahteraan secara mandiri. KUB merupakan kelembagaan nelayan yang berasal dari keinginan masyarakat nelayan yang ada dikota Batam. Tujuan dibentuknya KUB Perikanan tangkap adalah meningkatkan taraf hidup nelayan dan menjadi salah satu usaha yang produktif khususnya sektor Perikanan tangkap diharapkan menjadi wadah abgi nelayan untuk memfasilitasi kebutuhan dibidang Perikanan tangkap.

Tujuan membentuk kelompok nelayan dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah selaku pendamping Perikanan lapangan(PPL) :

“dalam berkelompok memiliki tujuan memupuk kebersamaan, kita bisa lihat sendiri kebiasaan nelayan yang memiliki sifat individualis, jika nelayan berkelompok akan lebih bisa mandiri, dan kebutuhan bisa terpenuhi melalui modal awal yang kelompok miliki tanpa harus mengharapkan bantuan, dan membantu meningkatkan pendapatan, dan kelompok nelayan terbentuk pastinya mempunyai tujuan dan visi misi yang sama, terutama jika nelayan berkelompok bisa mengatasi kekurangan atau keterbatasan modal dalam pengembangan usaha, menggapai impian dan dalam berkelompok bantuan yang diterima itu tidak perorangan dan harus berkelompok, dan nelayan harus mandiri dan bermartabat.” (wawancara 19 februari 2021).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Perikanan telah mendorong terciptanya kelompok-kelompok nelayan untuk menjadi wadah dalam organisasi dan pembentukan kelompok didasari satu tujuan serta visi misi yang sama, namun terbentuknya kelompok nelayan karena mendapatkan bantuan, sehingga kurang aktif dalam mengikuti kegiatan. Sehingga dinas Perikanan perlu memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok nelayan agar dapat berjalan semestinya. Dalam proses pembentukan kelompok nelayan diperlukan beberapa persyaratan dan strategi hal ini disampaikan oleh Bapak Mardijono, A.Pi,M.S selaku Pembina forum KUB Kota Batam.

“strategi dalam berkelompok yang dilakukan, mengumpulkan RT, RW, dan Lurah, mengadakan sosialisasi pentingnya berkelompok, semua bantuan dari Dinas Perikanan hanya bisa diberikan kepada masyarakat yang membentuk berkelompok, dan kesempatan untuk mengakses serta dilakukan dengan pendekatan secara sosial, kita harus memahami kebiasaannya terlebih dulu seperti individualis, boros, kurangnya pengetahuan, serta memberikan motivasi akan pentingnya berkelompok dan mengajak masyarakat yang paling berpengaruh dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jika kita mengajak tokoh yang paling berpengaruh tentu masyarakat yang lain akan turut ikut hadir dalam sosialisasi tersebut.” (wawancara 23 februari 2021).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dinas Perikanan mempunyai strategi dalam membentuk berkelompok dengan mengumpulkan orang yang terpenting di lingkungan masyarakat agar masyarakat lainnya mau membentuk kelompok nelayan. dengan terbentuknya kelompok dapat membantu kehidupan kelompok nelayan dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi terutama lemahnya ekonomi kelompok nelayan.

Tabel 4.1 Perkembangan KUB Nelayan Tangkap 2016-2019



Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam

Salah satu mengembangkan modal keuangan bagi nelayan adalah dengan lembaga keuangan mikro nelayan. Dengan ini diharapkan dapat mengurangi dan menyelesaikan masalah modal yang selama ini menjadi masalah nelayan. Peran sebagai fasilitator dapat diwujudkan dalam bentuk

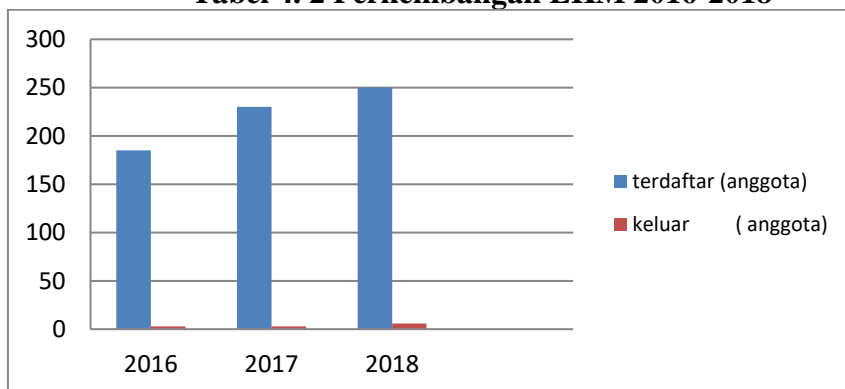
memfasilitasi melalui kemitraan Lembaga keuangan mikro Nelayan (LKM) bagi nelayan masalah kesejahteraan ekonomi dengan mempermudah mengakses modal. Lembaga mikro keuangan nelayan memiliki fungsi penyediaan modal bagi nelayan, dan bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nelayan untuk mengembangkan usahanya.

LKM dibentuk melihat kondisi lemahnya ketersediaan modal nelayan, nelayan sulit memenuhi persyaratan perbankan melalui pembiayaan, dan tidak memiliki agunan tambahan. Kemitraan kelompok perlu dibimbing dan didampingi agar kemitraan kelompok ini nantinya dapat mandiri baik untuk menjalankan usahanya, ataupun dalam mengatasi kesulitan dalam mengakses permodalan dengan tujuan dibuat memiliki tujuan dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Advokat selaku Kepala UPT Pelayanan Perikanan :

“Tujuan LKM terdiri dari memperkuat modal usaha nelayan dalam mengembangkan usaha nelayan dikarenakan sebelum Dinas Perikanan memiliki LKM, nelayan meminjam uang ke Bank Riau dan itu membutuhkan proses yang tidak mudah, nelayan juga tidak memiliki jaminan dalam bentuk surat-surat berharga untuk itu dinas Perikanan membuka LKM agar mempermudah untuk mengakses permodalan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, mempermudah dalam mengakses kebutuhan nelayan melalui saran dan prasarana melalui alat-alat penangkapan kelompok nelayan sehingga dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan membuat nelayan dalam melaut lebih efisien dan efektif serta LKM juga dibentuk untuk kepentingan kelompok nelayan dan dikelola oleh dan untuk kelompok nelayan” (wawancara 25 februari 2021).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya sudah tepat sasaran dan LKM dibuat untuk mempermudah mengakses permodalan nelayan untuk memenuhi kebutuhan kelompok nelayan, kemitraan dibentuk dengan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan bersama, dengan adanya LKM dapat mensejahterakan kelompok nelayan dan dapat membantu mengembangkan usaha kelompok nelayan.

Tabel 4. 2 Perkembangan LKM 2016-2018



Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam

Dalam hal ini peran yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan melalui kemitraan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, program-program yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kota Batam dan dilaksanakan seperti program simpan pinjam dan simpan pokok. Seperti Pernyataan ini juga disampaikan oleh bapak sahar dari kelompok nelayan bersama :

“ Lembaga keuangan mikro nelayan sangat berguna buat kelompok kami yang mempunyai pendapatan yang rendah, dengan adanya LKM dapat membantu kelompok meningkatkan pendapatan, produktivitas kelompok nelayan, dan kalau kami mau pinjam ke LKM proses nya tidak susah seperti dibank.” (wawancara 4 februari 2021).

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan peran dinas Perikanan kota Batam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan melalui kemitraan dapat membantu kelompok nelayan dalam meningkatkan perekonomian, dengan adanya kemitraan mempermudah kelompok

nelayan dalam mengakses permodalan untuk kebutuhan nelayan, dalam pelaksanaan kemitraan sudah tepat sasaran.

V. SIMPULAN

Peran dinas Perikanan kota Batam dalam meningkatkan perekonomian nelayan dikota Batam sudah terlaksana dan berjalan tepat sasaran, dapat dilihat dari melalui peran dinas Perikanan sebagai regulator berupa kebijakan langsung dari pemerintahan kota Batam dalam menggerakkan nelayan melalui bantuan alat-alat tangkap modern untuk membantu kelompok nelayan yang minim dengan sarana alat-alat tangkap modern, dengan adanya bantuan membuat kelompok nelayan yang didapatkan dapat membantu kelompok nelayan dalam kegiatan melaut nya. Dengan tersedianya alat-alat tangkap modern dapat membantu dalam meningkatkan hasil penangkapan, hasil produktifitas, serta pendapatan kelompok nelayan.

Dengan adanya peran sebagai fasilitator dapat membantu kelompok nelayan dalam memfasilitasi seperti adanya penyuluh berorientasi kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Keterampilan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak mampu menjadi mampu dalam usahanya. Sikap dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak mau menjadi mau dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan peluang usaha yang diciptakan. Penyuluhan ini diorientasikan dinas Perikanan dalam meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan. Bentuk pelatihan yang dimaksud adalah dengan mengundang kelompok nelayan yang dibuat oleh dinas Perikanan kota Batam. Peran dinas dalam hal penyedia pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok nelayan bertujuan untuk memberikan motivasi, meningkatkan pengetahuan, wawasan, memberikan informasi dan pemahaman tentang penggunaan alat-alat tangkap yang ramah terhadap lingkungan, dan membantu meningkatkan perekonomian kelompok nelayan setelah mengikuti pelatihan. Dan kelompok nelayan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kemandirian anggota dalam keberlangsungan aktivitas Perikanan tangkap. Kelompok nelayan diupayakan agar memiliki kemampuan dalam menentukan dan mempengaruhi perilaku kelompok dan anggotanya. Sebagai fasilitator dinas Perikanan juga memfasilitasi lembaga keuangan mikro keuangan nelayan untuk mengatasi kelompok nelayan yang menhgalami masalah keuangan dan dalam pelaksanaannya sudah tepat sasaran dan LKM dibuat untuk mempermudah mengakses permodalan nelayan untuk memenuhi kebutuhan kelompok nelayan, kemitraan dibentuk dengan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan bersama, dengan adanya LKM dapat mensejahterakan kelompok nelayan dan dapat membantu mengembangkan usaha kelompok nelayan. Dan sebagai dinamisator dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan Proses pendampingan dilakukan dengan tujuan mendampingi kelompok nelayan sampai dengan memonitoring dan mengevaluasi kelompok nelayan dengan tujuan agar kelompok nelayan dapat berjalan dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nariwati, Umi. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitati, Teori dan aplikasi*. Bandung: Agung Medi.
- Talizduhu, Ndraha. 1999. *Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Rieneka Cipta.
- Siagian, Sondang p. 2003. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soerjono, Suekamto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta :Rajawali Pers.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Batam Pusat Statistik. 2018. *Kota Batam Dalam Angka Batam Municipality In Figures 2018*. Batam.
- Dinas Komunikasi Informatika. 2019. *Statistik Sektoral Pemerintah Kota Batam 2019*. Batam.
- Dinas Perikanan Kota Batam. 2018. *Laporan Instansi Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kota Batam 2018*. Batam.

Skripsi dan Jurnal

- Fediansyah, Feri Ferdaus. 2015. “*Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Probolinggo*”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Malang. Jawa Timur.
- Kaswandi. 2017. “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar*”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kasming. 2019. “*Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan kelompok Tani Di Desa Lampoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah. Makasar.
- Kustiawan. 2020. “*Primordialisme dan Perilaku Memilih Etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2005-2021*”. *Jurnal Society* 8, (2). Hal 400.
- Nilasari, Dias. 2017. “*Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Jenawi, Billy. 2019. “*Peran Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah)*. *Jurnal Dialektika Publik*.” Universitas Putera Batam. Batam.
- Riyanda, Riko. 2018. “*Strategi Dinas Perikanan Kota Batam Dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan*.” *Jurnal Dialektika Publik*. Universitas Putera Batam. Batam.

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 3 /PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.